

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.2 November 2006
- Al Haryono Jusup. 2005. Teori Akuntansi, Edisi Keenam Jilid Satu, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Atyanta, Ramya.2012. Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten X di Jawa Timur)
- Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
- Halim, Abdul.2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Insani, Istyadi.2009. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP.2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo.2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Akrual)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Pertama Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Peter Salim, 1987 *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Ketiga

Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI

Rosjidi.2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Stanadar dan Metode*. Surabaya. Aksara Satu

Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.2, No.2, November 2000 : 138-150

Sekaran, Uma.2006. *Research Methods For Business*. Jakarta Salemba Empat

Sembiring, Sri.2009. *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemeliharaan dalam realisasi Anggaran Pemerintahan dalam Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis USU

Suherman Toha, 2007, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Barang Milik Negara/Daerah

